

Penentuan Prioritas Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pesisir Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur

Fahmy Abdillah Syaiful dan Arwi Yudhi Koswara

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

e-mail: arwiyudhi@gmail.com

Abstrak—Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan merupakan kecamatan pesisir Kabupaten Kutai Timur yang memiliki berbagai potensi untuk dikembangkan. Karena berada pada wilayah pesisir, potensi yang dapat dikembangkan yaitu seperti subsektor perikanan dan sub sektor wisata bahari. Namun dalam kondisi dilapangan, infrastruktur yang mendukung pengembangan kedua subsektor tersebut masih dinilai dan dirasa kurang. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan prioritas pengembangan infrastruktur pesisir di Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah rasionalistik dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Dalam penentuan prioritas pengembangan infrastruktur wilayah pesisir di Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan digunakan teknik *importance-performance analysis* dengan melibatkan stakeholder terpilih. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui prioritas kelompok infrastruktur yaitu: prioritas 1 (*cold storage*, TPI, dan drainase), prioritas 2 (jalan, air bersih, fasilitas pendukung transportasi, persampahan, dan jaringan telekomunikasi), dan prioritas 3 (SPBU, sentra pengolahan ikan, KUD, rumah makan, taman bermain, dan hotel atau *homestay*).

Kata Kunci— Infrastruktur, Prioritas, Wilayah Pesisir.

I. PENDAHULUAN

INFRASTRUKTUR merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan ekonomi. Hubungan antara dua hal tersebut merupakan hubungan yang saling timbal balik karena infrastruktur yang dibangun dapat menimbulkan perluasan ekonomi sedangkan akibat dari perluasan ekonomi yaitu munculnya kebutuhan-kebutuhan infrastruktur baru yang dapat bertujuan untuk memperlancar mobilisasi pergerakan manusia dan barang. Infrastruktur juga menjadi hal yang sangat penting bagi suatu daerah dengan ketertinggalan infrastruktur, guna menjadi sarana untuk meningkatkan ekonomi daerah tersebut terkhusus daerah yang memiliki banyak potensi. Bersumber dari *The Routledge Dictionary of Economics* (2002), menjelaskan bahwa infrastruktur merupakan pelayan utama dari suatu negara yang membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berlangsung yaitu dengan menyediakan transportasi, kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan dan bangunan untuk kegiatan masyarakat serta fasilitas pendukung lainnya [1].

Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan merupakan dua kecamatan yang cukup penting terkait

arahan-arahan pengembangan wilayah di Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan RTRW Kabupaten Kutai Timur dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, dua kecamatan dari Kabupaten Kutai Timur yaitu Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Selatan termasuk kategori PKW (Pusat Kegiatan Wilayah). Selain menjadi PKW, dua kecamatan tersebut juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Perikanan dan Pariwisata. Oleh karena itu, Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan dituntut untuk bisa melayani kebutuhan wilayah sendiri dan wilayah lainnya [2].

Pesisir merupakan suatu kawasan yang memiliki berbagai macam potensi untuk dikembangkan. Menurut Triatmodjo (1999), potensi kawasan pesisir dapat dikembangkan secara intensif untuk berbagai fungsi seperti kawasan pusat pemerintahan, permukiman, industri, pelabuhan, pertambangan, pertanian atau perikanan, pariwisata dan sebagainya [3]. Kawasan pesisir merupakan kawasan yang penting bagi kehidupan manusia. Kawasan pesisir menjadi tempat bagi sebagian besar penduduk dunia tinggal dan beraktivitas. Menurut Kodoatie dan Sjarief (2010), pada awal tahun 1990 diperkirakan 50-70% penduduk dunia tinggal di kawasan pesisir dan pada akhir abad ke 20 diperkirakan jumlah penduduk dunia yang akan tinggal di kawasan pesisir yaitu lebih dari 75% total keseluruhan [4]. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia dalam hal ini di wilayah pesisir, tentunya membutuhkan infrastruktur penunjang. Menurut Sara (2014), usaha pengelolaan wilayah pesisir untuk mendukung pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan cara peningkatan peyediaan sarana dan prasarana yang berorientasi pada potensi wilayah pesisir [5].

Dalam RSWP3K (Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) Tahun 2016-2036 Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur memiliki garis pantai sepanjang 152 km [6]. Memiliki garis pantai dengan panjang 152 km, Kabupaten Kutai Timur berpotensi untuk mengembangkan ekonomi melalui sumber daya yang ada di kawasan pesisir dan tidak hanya melalui sektor pertambangan dan pertanian saja yang memang memiliki kontribusi besar bagi PDRB Kutai Timur. Berdasarkan data BPS Kalimantan Timur tahun 2018 jumlah produksi perikanan tangkap Kabupaten Kutai Timur yaitu sebesar 7.682 ton. Selain melihat subsektor perikanan, subsektor wisata bahari juga cukup menjanjikan [7].

Di Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan memiliki beberapa objek wisata pantai yang berada

di wilayah pesisir yaitu Pantai Aquatik, Pantai Teluk Lombok, dan Pantai Teluk Perancis. Dengan potensi kawasan pesisir Kabupaten Kutai Timur tersebut, perlu adanya suatu katalis bagi pertumbuhan ekonomi dari sektor ekonomi pesisir yaitu dengan penyediaan infrastruktur yang memadai.

Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan adalah dua kecamatan pesisir dari beberapa kecamatan pesisir yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan RTRW Kabupaten Kutai Timur, Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah dan juga masuk dalam kawasan strategis andalan nasional Sasamawa (Sangkulirang, Sangatta, dan Muara Wahau). Selain itu, potensi-potensi sektor ekonomi yang dimiliki seperti sektor perikanan dan pariwisata juga perlu pengembangan untuk pemenuhan kebutuhan wilayah. Dengan tanggung jawab yang dibebankan pada dua kecamatan tersebut, maka dibutuhkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung perkembangan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya. Namun apabila melihat kondisi eksisting infrastruktur yang ada masih belum optimal dalam pelayanannya. Infrastruktur dasar seperti drainase, Infrastruktur pendukung subsektor perikanan seperti TPI, dan infrastruktur pendukung subsektor wisata bahari seperti rumah makan di Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan yang seharusnya dapat mendukung pelayanan membuat potensi sektor ekonomi pesisir belum dapat dieksplorasi secara optimal. Maka dari itu, dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penentuan prioritas infrastruktur pesisir di Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan pelayan utama dari suatu negara yang membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berlangsung yaitu dengan menyediakan transportasi, kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan dan bangunan untuk kegiatan masyarakat serta fasilitas pendukung lainnya [1]. Menurut Grigg (1988), infrastruktur pada sistem fisik dapat menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi [8]. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama sistem sosial dan dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat [9]. Menurut Stone (1974), infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas pihak yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial [10]. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Definisi mengenai infrastruktur juga dinyatakan oleh Kelompok Bidang Keahlian Manajemen Rekayasa Konstruksi ITB, bahwa

Tabel 1.
Kelompok Jenis Infrastruktur

No.	Kelompok	Infrastruktur
1	Transportasi	Jalan, Jalan Raya, Jembatan
2	Pelayanan Transportasi	Transit, Bandara, Pelabuhan
3	Komunikasi	
4	Keairan	Air, Air Buangan, Sistem Keairan (Sungai, Saluran Terbuka, Pipa)
5	Pengolahan Limbah	Sistem Pengolahan Limbah
6	Bangunan	
7	Distribusi dan Produksi Energi	Listrik dan Gas

infrastruktur (prasarana) adalah bangunan atau fasilitas fisik yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi suatu masyarakat atau komunitas.

Setelah mengenal definisi infrastruktur dari berbagai sumber, kemudian infrastruktur yang terdiri dari bermacam komponen perlu pula diketahui pengelompokannya. Berdasarkan *World Development Report* (1994) infrastruktur terbagi menjadi tiga kategori, yaitu [11]:

- Prasarana Umum**
Prasarana umum terdiri dari beberapa contoh komponen infrastruktur seperti listrik, telekomunikasi pipa air bersih, sanitasi dan sistem pembuangan, pembuangan dan pengumpulan limbah padat dan pipa gas.
- Infrastruktur Umum**
Infrastruktur umum terdiri dari infrastruktur seperti jalan, bendungan utama, dan kanal untuk irigasi dan drainase.
- Sektor Transportasi**
Sektor transportasi terdiri dari infrastruktur seperti Jalur kereta api, Pelabuhan, Bandara Udara dan Jalur Air.
Grigg dan Fontane (2000) memberikan penjelasan mengenai kelompok besar jenis infrastruktur yang ditunjukkan pada Tabel 1 [9].

Selanjutnya, infrastruktur kemudian terbagi menjadi dua, yaitu infrastruktur dasar dan infrastruktur pelengkap [12]. Berikut pembagian infrastruktur tersebut.

- Infrastruktur Dasar**
Infrastruktur dasar merupakan infrastruktur yang memiliki karakteristik yaitu tidak dapat diperjualbelikan dan tidak bisa dipisahkan secara teknis maupun spasial. Contoh infrastruktur dasar yaitu jalan raya, kereta api, kanal, pelabuhan laut, drainase, bendungan dan sebagainya.
- Infrastruktur Pelengkap**
Infrastruktur pelengkap yaitu seperti infrastruktur gas, listrik, telepon dan pengadaan air minum.

B. Infrastruktur Pesisir

Berdasarkan pengertian-pengertian dan yang telah diketahui dari berbagai sumber diatas dapat diketahui bahwa infrastruktur yang memadai pada suatu wilayah dapat memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir. Dengan karakteristik potensi yang khas dan tidak dimiliki oleh wilayah lain, wilayah pesisir perlu mengembangkan infrastruktur yang sesuai agar semua potensi yang ada dapat di eksplorasi secara optimal. Menurut Sara (2014), suatu tindakan yang dapat mendukung pengelolaan wilayah pesisir yaitu dengan membangun sarana dan prasarana pesisir dan laut untuk optimalisasi peluang pembangunan pesisir dan laut [5]. Bersumber dari artikel yang ditulis oleh Leonardo R.

Tabel 2.
Sintesa Pustaka

World Bank (1994)	Grigg (1988)	Stone (1974)	Jan Jacobs, et al (1999)	Nur (2016)	Hidayat	Warsilan et al (2015)	Ekosafitri (2017)	Astami (2015)	Sintesa
Listrik	Jalan, Jalan Raya, Jembatan Transit, Bandara, Pelabuhan	Jaringan Air	Jalan Raya	Tempat Pelelangan Ikan		Puskesmas	Tempat Pelelangan Ikan	Kondisi Jalan	Jalan
Telekomunikasi		Listrik	Kereta Api	<i>Cold Storage</i>		Air Bersih	SPBN	Moda Transportasi	Air Bersih
Pipa Air	Komunikasi		Kanal	Pabrik Es		Jalan	Sandaran Perahu	Fasilitas Pendukung Transportasi	Koperasi Unit Desa
Sanitasi	Sistem Keairan	Pembuangan Limbah	Pelabuhan Laut	Koperasi Desa	Unit		Kantor Pengelola TPI	Sarana Rekreasi	Tempat Pelelangan Ikan
Sistem Pembuangan Limbah padat	Air Buangan	Transportasi	<i>Drainase</i>	Jaringan Jalan			Sentra Pengolahan Ikan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<i>Cold Storage</i>
Pipa Gas	Sungai Saluran Terbuka Sistem Pengelolaan Limbah Padat		Bendungan	Moda Transportasi			Fasilitas Docking	Fasilitas Penginapan dan Hotel	Fasilitas Pendukung Transportasi
Jalan			Gas	Fasilitas Pendukung Transportasi			Jalan	Restoran dan Tempat Makan	SPBU
Bendungan	Bangunan		Listrik	Pengelolaan Limbah dan Sanitasi			Hotel dan <i>Homestay</i>		Persampahan
Irigasi dan <i>Drainase</i>	Listrik dan Gas		Telepon	SPBU			Rumah Makan		Rumah Makan
Jalur Kereta Api, Pelabuhan, Bandar Udara			Pengadaan Air Minum	Persampahan			Taman Bermain		Taman Bermain
Jalur Air				<i>Drainase</i>			Pelabuhan Moda Transportasi		Telekomunikasi
				Telekomunikasi					Jaringan Listrik
				Jaringan Air Bersih					Hotel dan <i>Homestay</i>
				Jaringan Listrik					Puskesmas
									<i>Drainase</i>
									Sentra Pengolahan Ikan

Corral dan kawan yang berjudul *The Impact of Coastal Infrastructure Improvements on Economic Growth: Evidence from Barbados* (2016), menjelaskan bahwa perbaikan kualitas infrastruktur pesisir dapat merangsang ekonomi lokal dan dapat membawa ekonomi ke pertumbuhan yang lebih tinggi di lokasi tersebut [13].

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai infrastruktur dan kaitannya dengan wilayah pesisir sudah pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai contoh penelitian oleh Nur Hidayat (2016) dalam menentukan infrastruktur apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan wilayah pesisir untuk mendukung sektor perikanan dan perdagangan jasa [14]. Pada penelitian tersebut diketahui bahwa infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan wilayah pesisir terbagi menjadi empat kuadran. Kuadran pertama terdiri dari empat infrastruktur yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI), *Cold Storage*, Pabrik Es, dan Koperasi Unit Desa. Pada kuadran kedua terdapat infrastruktur yaitu jaringan jalan, moda transportasi, fasilitas pendukung transportasi, dan pengelolaan limbah dan sanitasi. Kuadran yang ketiga hanya terdiri dari satu jenis infrastruktur yaitu SPBU serta kuadran keempat berisi infrastruktur persampahan, *drainase*, telekomunikasi, jaringan air bersih, dan jaringan listrik.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Warsilan *et al* (2015), menggambarkan adanya hubungan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur di Kota Samarinda [15]. Dalam penelitiannya, menjelaskan bahwa infrastruktur yang memiliki pengaruh positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda yaitu puskesmas, air bersih, dan jalan.

Selain itu, terdapat pula jurnal yang mengangkat tema mengenai pesisir dan infrastruktur pada wilayah studi lain. Jurnal tersebut berjudul Pengembangan Wilayah Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah Berdasarkan Infrastruktur Daerah: Studi Kasus Kabupaten Jepara yang ditulis oleh Ekosafitri *et al* (2017) [16]. Terdapat dua tujuan dalam penelitian ini. Pertama yaitu menganalisis tingkat perkembangan kecamatan berdasarkan kelengkapan infrastruktur wilayah dan yang kedua menganalisis persepsi stakeholder mengenai pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Jepara. Dalam jurnal diketahui bahwa variabel infrastruktur yang digunakan adalah TPI, SPBN, sandaran perahu, kantor pengelola TPI, sentra pengolahan ikan, fasilitas *docking*, jalan, hotel dan *homestay*, rumah makan, taman bermain, dan pelabuhan.

Dalam jurnal yang berjudul Penentuan Prioritas Pengembangan Infrastruktur Kawasan Wisata Bahari di Desa Sumberejo, Desa Lojejer dan Desa Puger Kulon, Kabupaten Jember berdasarkan Preferensi Pengunjung dan Masyarakat

Tabel 3.
Indikator dan Variabel Penelitian

Indikator	Variabel
Infrastruktur Dasar	Jaringan Jalan
	Air Bersih
	Jaringan Listrik
	Drainase
	Persampahan
	Telekomunikasi
Infrastruktur Pendukung Subsektor Perikanan	Fasilitas Pendukung Transportasi
	Puskesmas
	Tempat Pelelangan Ikan
	<i>Cold Storage</i>
	SPBU
Infrastruktur Pendukung Subsektor Wisata Bahari	Sentra Pengolahan Ikan
	Koperasi Unit Desa
	Rumah Makan
	Taman Bermain
	Hotel dan <i>Homestay</i>

Tabel 4.
Stakeholder Terpilih

No	<i>Stakeholder</i>
1	Bappeda Kab. Kutai Timur
2	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Timur
3	Dinas Tata Ruang Kab. Kutai Timur
4	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kutai Timur
5	Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kab. Kutai Timur
6	Dinas Pariwisata Kab. Kutai Timur
7	Kecamatan Sangatta Utara
8	Kecamatan Sangatta Selatan
9	Tokoh Masyarakat

yang ditulis oleh Astami (2015), bertujuan untuk menganalisa prioritas pengembangan infrastruktur berdasarkan preferensi pengunjung dan masyarakat melalui analisis tingkat kepentingan dan kinerja infrastruktur [17]. Diketahui bahwa prioritas pengembangan infrastruktur wisata bahari yaitu kondisi jalan, moda transportasi, fasilitas pendukung transportasi, sarana rekreasi, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas penginapan dan hotel, serta restoran dan tempat makan lainnya.

D. Sintesa Pustaka

Sintesa pustaka penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan penelitian rasionalistik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif.

B. Variabel Penelitian

Indikator penelitian yang digunakan untuk mengetahui prioritas infrastruktur wilayah pesisir Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan antara lain infrastruktur dasar, infrastruktur pendukung subsektor perikanan, dan infrastruktur pendukung subsektor wisata bahari. Tabel 3 menunjukkan indikator dan variabel penelitian.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu survei primer dan survei sekunder. Survei primer dilakukan melalui kuisioner dan wawancara kepada

Tabel 5.
Skala Pengukuran Likert

Keterangan	<i>Importance</i>	<i>Performance</i>
5	Sangat Penting	Sangat Baik
4	Penting	Baik
3	Cukup Penting	Cukup Baik
2	Kurang Penting	Kurang Baik
1	Sangat Kurang Penting	Sangat Kurang Baik

Tabel 6.
Nilai Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kinerja

No.	Variabel	Tingkat Kepentingan	Tingkat Kinerja
1	Jaringan Jalan	4,78	2,78
2	Air Bersih	4,56	3,00
3	Jaringan Listrik	4,33	2,89
4	Fasilitas Pendukung Transportasi	4,44	2,33
5	Persampahan	4,67	2,56
6	<i>Drainase</i>	4,44	2,22
7	Puskesmas	4,33	2,89
8	Telekomunikasi	4,44	3,33
9	Tempat Pelelangan Ikan	4,67	2,00
10	<i>Cold Storage</i>	4,78	1,56
11	SPBU	4,11	1,67
12	Sentra Pengolahan Ikan	4,33	1,44
13	Koperasi Unit Desa	4,11	1,78
14	Rumah Makan	4,33	2,11
15	Taman Bermain	3,78	1,67
16	Hotel dan <i>Homestay</i>	3,78	1,56
17	C-Line	4,37	2,24

stakeholders terkait. Sedangkan survei sekunder dilakukan melalui studi literature dan survei instansional dari dokumen-dokumen instansi terkait di Kab. Kutai Timur. *Stakeholder* terpilih direpresentasikan pada Tabel 4.

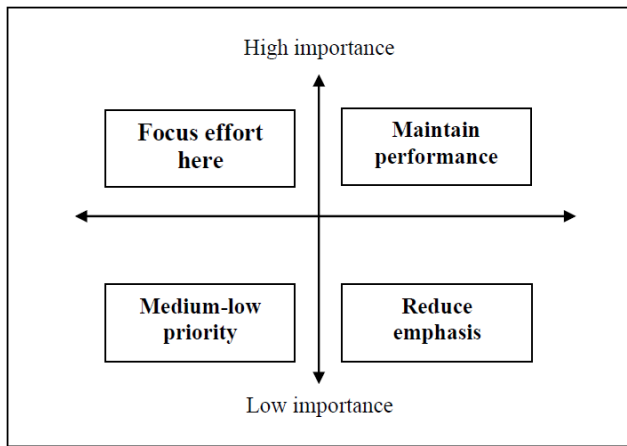
D. Metode Analisis

Untuk mengetahui prioritas infrastruktur wilayah pesisir di Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan, digunakan metode *important-performance analysis*. Penerapan analisis adalah untuk mengetahui infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan infrastruktur melalui tingkat kepentingan dan kinerja infrastruktur yang ada di kawasan pesisir Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur. Hasil dari kuisioner dapat diketahui kepentingan dan kinerja infrastruktur dari yang paling dominan hingga paling kecil berdasarkan preferensi *stakeholder* dalam bentuk kuadran.

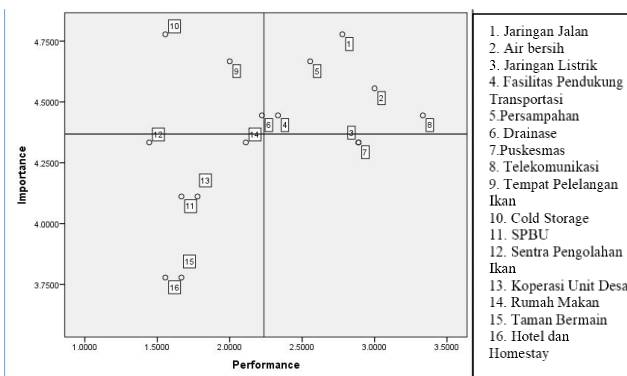
Untuk mengetahui tingkat kepentingan dan tingkat kinerja infrastruktur, menggunakan skala likert melalui dua pertanyaan, yaitu seberapa pentingkah dan seberapa baik kinerja masing-masing jenis infrastruktur tersebut. Skala likert digunakan untuk mengukur variabel penelitian sosial seperti sikap, pendapat, persepsi sosial atau kelompok. Skala likert dapat dilihat pada Tabel 5.

Dari penilaian dengan menggunakan skala likert, kemudian dilakukan plotting mean tersebut ke dalam kuadran IPA seperti pada Gambar 1.

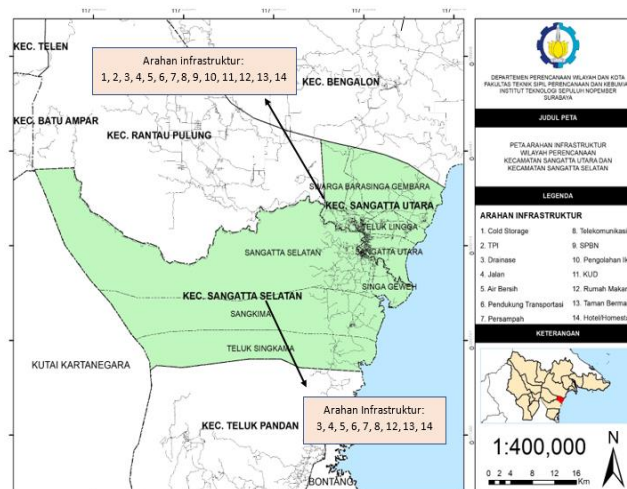
Kuadran 1 (*focus effort here*) adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting tetapi pada kenyataannya kondisi eksistingnya belum sesuai harapan. Variabel yang masuk dalam kategori ini harus ditingkatkan. Kuadran 2 (*maintain performance*) adalah wilayah yang



Gambar 1. Diagram Kuadran Analisis IPA.



Gambar 2. Matrik Kuadran Hasil Analisis IPA.



Gambar 3. Peta Arahan Infrastruktur Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan.

memuat faktor yang dianggap penting dan juga kondisi eksistingnya sudah sesuai dengan harapan. Variabel-variabel yang masuk dalam kategori ini harus tetap dipertahankan. Kuadran 3 (*medium-low priority*) adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting dan juga kondisi eksistingnya tidak sesuai dengan harapan. Untuk peningkatan variabel-variabel yang masuk dalam kategori tersebut belum menjadi prioritas dan perlu dipertimbangkan pengembangannya. Kuadran 4 (*reduce emphasis*) faktor-faktor yang masuk dalam wilayah ini dianggap kurang penting dan kenyataan kondisinya pun sudah dianggap baik. Variabel yang masuk dalam kuadran ini dapat dikurangi karena pertimbangan kondisinya yang sudah melebihi harapan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukannya analisis IPA yang datanya bersumber dari *stakeholder*, didapatkan nilai tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja dari tiap variabel infrastruktur. Berikut nilai tingkat kepentingan dan kinerja variabel.

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa garis potong atau yang disebut garis C-Line untuk sumbu x yaitu pada 2,24 dan untuk sumbu y yaitu pada 4,37. Setelah mendapat garis potong maka selanjutnya dapat diketahui variabel-variabel infrastruktur apa saja yang terbagi ke dalam empat kuadran. Pada kuadran I yaitu infrastruktur yang memiliki nilai tingkat kepentingan di atas 4,37 dan nilai tingkat kinerja dibawah 2,24 adalah *cold storage*, tempat pelelangan ikan, dan drainase. Untuk infrastruktur yang masuk dalam kuadran II yaitu yang memiliki nilai tingkat kepentingan diatas 4,37 dan nilai tingkat kinerja di atas 2,24 adalah jaringan listrik, air bersih, fasilitas pendukung transportasi, persampahan, jaringan telekomunikasi. Kemudian infrastruktur yang masuk ke dalam kuadran III yaitu yang memiliki nilai tingkat kepentingan dibawah 4,37 dan nilai tingkat kinerja di bawah 2,24 adalah SPBU, sentra pengolahan ikan, koperasi unit desa, rumah makan, taman bermain, dan hotel atau *homestay*. Dan terakhir untuk kuadran IV yaitu infrastruktur yang memiliki nilai tingkat kepentingan di bawah 4,37 dan nilai tingkat kinerja di atas 2,24 adalah jaringan listrik dan puskesmas. Matriks pembagian kuadran infrastruktur disajikan pada Gambar 2.

V. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh urutan prioritas pengembangan infrastruktur wilayah pesisir yang dilakukan melalui berbagai pertimbangan antara lain dengan memperhatikan hasil dari persepsi dan preferensi *stakeholder* terpilih pada analisis IPA. Prioritas pengembangan infrastruktur diambil dari kategori infrastruktur yang masuk dalam kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3. Berikut merupakan prioritas pengembangan infrastruktur wilayah pesisir di Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan; (1) Kuadran I (*focus effort here*) meliputi *cold storage*, tempat pelelangan ikan, dan *drainase*; (2) Kuadran II (*maintain performance*) meliputi jaringan jalan, air bersih, fasilitas pendukung transportasi, persampahan, dan jaringan telekomunikasi; (3) Kuadran III (*medium-low priority*) meliputi SPBU, sentra pengolahan ikan, koperasi unit desa, rumah makan, taman bermain, hotel, dan *homestay*.

Infrastruktur yang telah didapat yaitu *cold storage*, TPI, drainase, jaringan jalan, air bersih, fasilitas pendukung transportasi, persampahan, jaringan telekomunikasi, SPBU, sentra pengolahan ikan, KUD, rumah makan, taman bermain, dan hotel atau *homestay* diharapkan nantinya dapat mendukung pengembangan sektor perikanan dan sektor pariwisata di Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan. Adapun peta arahan infrastruktur di wilayah studi dapat dilihat pada Gambar 3.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan serta pihak-pihak lain yang telah

menjadi sumber data dalam menyukseskan penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. D. Reid, "Routledge Dictionary of Economics (2nd edition) 200365 Donald Rutherford. Routledge Dictionary of Economics (2nd edition). London: Routledge 2002. xxiv + 671 pp., ISBN: 0 415 25091 9 £19.99 (paperback) First published 1992 as Dictionary of Economics," *Ref. Rev.*, vol. 17, no. 2, 2003, doi: 10.1108/09504120310461608.
- [2] Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya, "Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 - 2035," *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur*, 2016.
- [3] T. Bambang, "Teknik Pantai," *Beta Offset, Yogyakarta*, 1999.
- [4] R. J. Kodoatie and R. Sjarief, *Tata Ruang Air*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.
- [5] L. Sara, *Pengelolaan Wilayah Pesisir – Gagasan Memelihara Aset Wilayah Pesisir dan Solusi Pembangunan Bangsa*, 1st ed. Bandung: Alfabeta, 2014.
- [6] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, "Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2016-2036," *Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda*, 2016.
- [7] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda, "Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2014-2018," *Badan Pusat Statistik*, 2019.
- [8] N. S. Grigg, *Infrastructure Engineering and Management*, 1st editio. New York: Wiley-Interscience, 1988.
- [9] N. Grigg and F. G. Darrel, *Infrastructure System Management & Optimization*. Semarang: Diponegoro University, 2000.
- [10] D. C. Stone, *Professional Education in Public Works: Environmental Engineering and Administration. A Handbook for Establishing University Centers and Programs*. Chicago: American Public Work Association, 1974.
- [11] World Bank Group, *World Development Report 1994: Infrastructure for Development*. New York: Oxford University, 1994.
- [12] M. H. Sibarani, "Kontribusi Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," Universitas Indonesia, 2002.
- [13] C. Leonardo, M. Schling, C. Rogers, F. Cumberbatch, Janice Hinds, N. Zhou, and M. H. Lemay, *The Impact of Coastal Infrastructure Improvements on Economic Growth: Evidence from Barbados*. Inter-American Development Bank, 2016.
- [14] N. Hidayat, "Arahan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pesisir Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan," Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2016.
- [15] W. Warsilan and A. Noor, "Peranan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan implikasi pada kebijakan pembangunan di Kota Samarinda," *Mimb. J. Sos. dan Pembang.*, vol. 31, no. 2, pp. 359–366, 2015.
- [16] K. H. Ekosafitri, E. Rustiadi, and F. Yulianda, "Pengembangan wilayah pesisir pantai utara Jawa Tengah berdasarkan infrastruktur daerah: studi kasus Kabupaten Jepara," *J. Reg. Rural Dev. Plan.*, vol. 1, no. 2, pp. 145–157, 2017.
- [17] R. A. G. Astami and K. D. M. Erli, "Penentuan prioritas pengembangan infrastruktur kawasan wisata bahari di Desa Sumberejo, Desa Lojejer, dan Desa Puger Kulon, Kabupaten Jember berdasarkan preferensi pengunjung dan masyarakat," *J. Tek. ITS*, vol. 4, no. 1, pp. C45–C50, 2015.